**PERBAIKAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI PENGEMBANGAN BAHAN AJAR MENGACU KURIKULUM 2013[[1]](#footnote-1)**

**Andi Prastowo**

Program Studi PGMI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga

anditarbiyah@gmail.com

**Abstract**

Persoalan besar bangsa Indonesia dari mulai tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, rendahnya daya saing sumber daya manusia, dan tingginya angka persepsi korupsi di Indonesia merupakan tantangan pendidikan nasional. Kondisi tersebut sesungguhnya merupakan manifestasi dari rendahnya mutu pendidikan di Indonesia. Untuk itu, perbaikan pendidikan nasional perlu dilakukan secara komprehensif dan sistematis yang mampu mendorong tercapainya konsisi *equity*, *equality*, dan *quality*, serta pendidikan sebagai sarana mobilitas sosial bukan reproduksi sosial. Hal tersebut terutama dimulai dari perbaikan proses pembelajaran. Perubahan Kurikulum 2013 menemukan relevansinya sebagai salah satu solusi untuk mengatasi berbagai tantangan pendidikan nasional melalui perbaikan mutu proses. Untuk keberhasilan proses tersebut, pengembangan bahan ajar yang disusun sesuai prosedur umum dan prosedur khusus yang mengacu Kurikulum 2013 menjadi suatu keharusan.

**Keywords:** tantangan pendidikan nasional, perbaikan mutu, proses pembelajaran, bahan ajar.

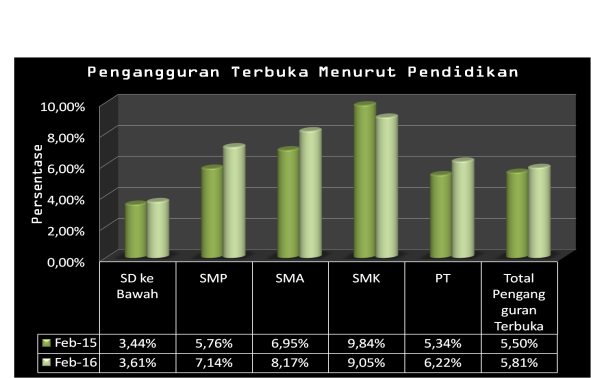
**PENDAHULUAN**

Tantangan pendidikan Indonesia saat ini semakin berat. Di samping, persoalan pemerataan (*equity*) dan keadilan (*equality*) yang belum tuntas, Pemerintah masih dihadapkan dengan tugas berat untuk memperbaiki mutu (*quality*) pendidikan nasional yang tidak kunjung maju. Setidak-tidaknya, tantangan pendidikan nasional dihadapkan dengan 7 persoalan besar bangsa, yaitu: *pertama*, yaitu angka kemiskinan yang tinggi. Sejalan dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2015 yang mencatat bahwa jumlah rakyat miskin, penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan, sebanyak 28,59 juta orang, setara dengan 11, 22 persen penduduk. Mereka inilah yang berada dalam kemiskinan kronis karena berada di bawah garis kemiskinan: pengeluaran per kapita per bulan sebesar Rp, 312.328. Bank Dunia (2014) mencatat penduduk yang berada sedikit di atas garis kemiskinan jumlahnya masih besar, 65 juta jiwa, juga sangat rentan jatuh miskin. Bahkan menurut lembaga pemikir dan peneliti Perkumpulan Prakarsa (2015), sebagaimana diungkapkan Maftuchan, kemiskinan moneter, ala BPS dan Bank Dunia di atas tidak memadai untuk meliha kemiskinan secara komprehensif. Melalui Indeks Kemiskinan Multidimensi, Prakarsa memasukkan tiga dimensi (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup) untuk melihat kemiskinan multidimensi di Indonesia. Hasilnya, angka kemiskinan multidimensi Indonesia masih tinggi, yakni 29,7 persen pada 2014. Artinya, 79,5 juta jiwa atau 19,3 juta rumah tangga tergolong miskin multidimensi, yakni tejerat masalah pendidikan, kesehatan, dan standar hidup (Mafuchan, Kompas, 5/3/2016).

*Kedua*, yaitu jumlah pengangguran terbuka yang besar. Persoalan kedua ini pada dasarnya menjadi sebab utama persoalan pertama. Hal tersebut terutama jika dipahami dengan menggunakan paradigma *employment-ism,* yaknikemiskinan yang semakin berat dapat dilihat dari kondisi tingginya pengangguran (Nugroho, 2010:89). Kondisi tersebut terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1

Pengangguran Terbuka Menurut Pendidikan



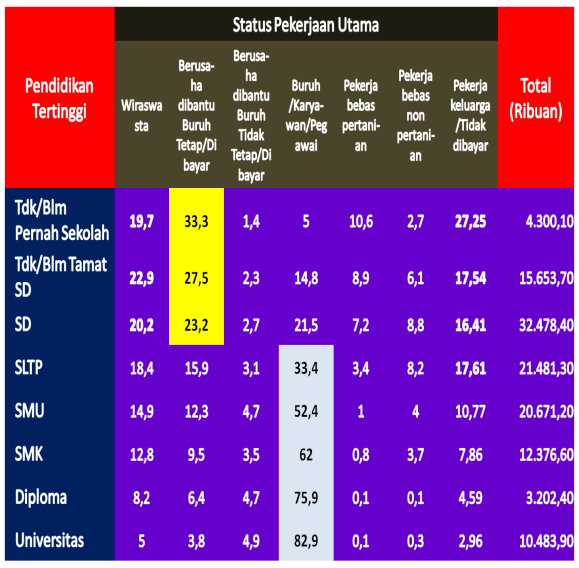
(Sumber: BPS, 2015 dan 2016)

Dari Tabel 1 tersebut terlihat bahwa pada Februari 2016 tingkat pengangguran terbuka nasional mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen. Jumlah tersebut menurun dibandingkan dengan Februari 2015 yang mencapai 7,45 juta orang atau 5,81 persen. Ditinjau dari taraf pendidikannya, persentase lulusan SD ke bawah yang menganggur mencapai 3,44 persen, lebih kecil daripada tahun 2015 sebesar 3,61 persen. Untuk pengangguran berpendidikan sekolah menengah pertama, jumlahnya juga mengalami penurunan, yakni dari 7,14 persen pada tahun 2015 menjadi 5,76 persen pada tahun 2016. Hal serupa juga terjadi pada pengangguran dari sekolah menengah atas menurun dari 8,17 persen pada tahun 2015 menjadi 6,95 persen pada tahun 2016. Adapun tingkat pengangguran tertinggi adalah lulusan sekolah menengah kejuruan dengan persentase 9,84 persen pada tahun 2016, atau meningkat dari 9,05 persen pada tahun 2015. Peningkatan serupa juga terjadi pada lulusan universitas tingkat penganggurannya justru meningkat dari 5,34 persen pada tahun 2015 menjadi 6,22 persen pada tahun 2016 (Sawitri, https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-o2-juta-orang, 17/10/2016).

*Ketiga*, yaitu ketimpangan struktur antara *suply and demand*. Maksudnya, selama ini terjadi kelebihan ketersediaan pasokan tenaga kerja (lulusan) yang tidak seimbang atau tidak sebanding dengan struktur kesempatan kerja menurut pendidikan. Seperti terlihat pada Tabel 2.

Tabel 2

Ketimpangan Struktur antara *Suply and Demand* di Indonesia



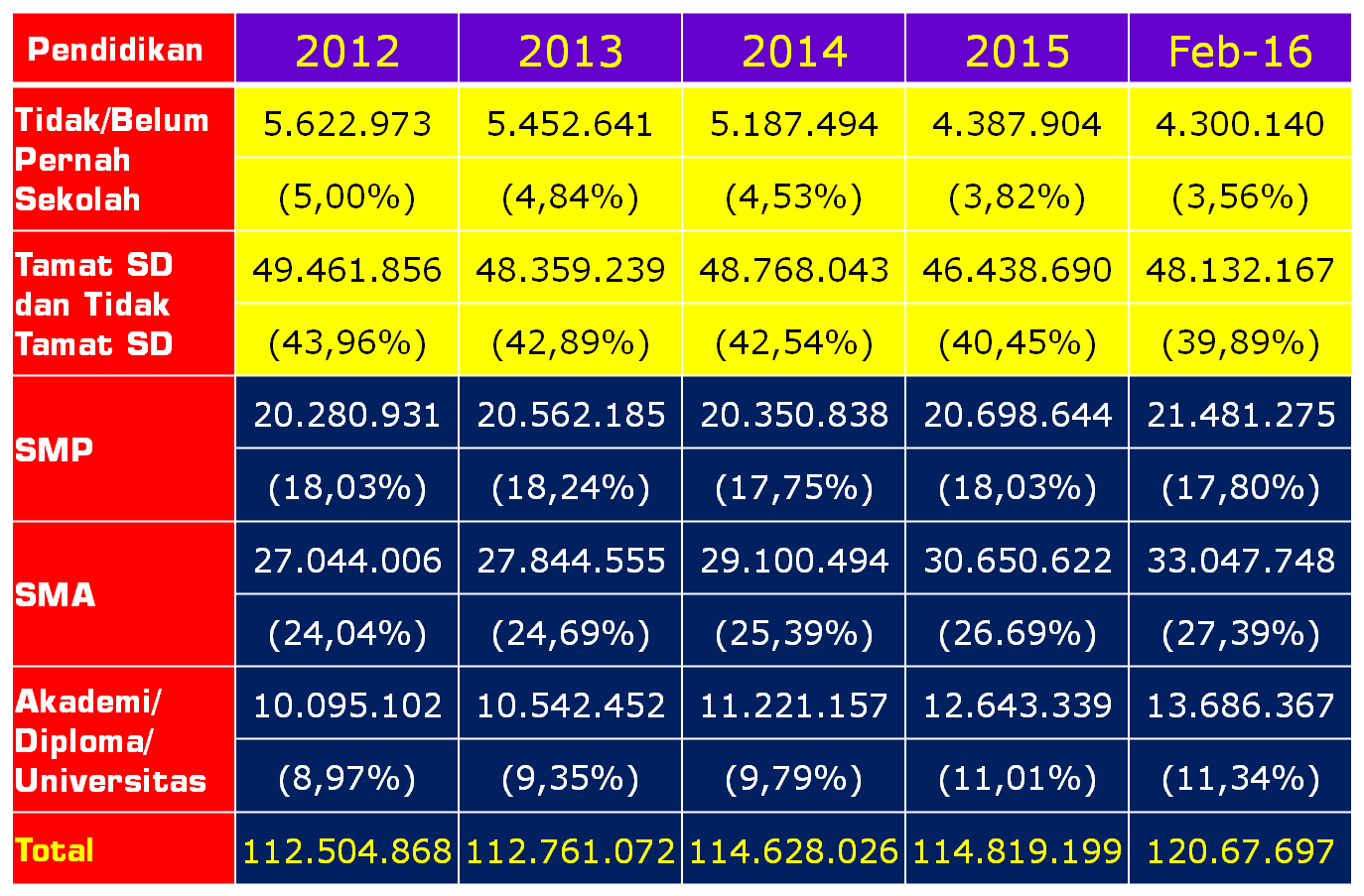
(Sumber: BPS, 2016)

Berdasarkan Tabel 2 terlihat bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin banyak mereka yang bekerja untuk orang lain (buruh/karyawan/pegawai). Jika tamatan SD yang berstatus karyawan hanya 15 persen, maka lulusan SMA ke atas yang bekerja sebagai karyawan mencapai 63,99 persen. Menurut Suryadi (2014:79), kondisi tersebut menyebabkan pengangguran lulusan SMA ke atas lebih banyak bergantung pada tersedianya lapangan kerja sektor formal, seperti kantor pemerintah, kantor swasta, atau pekerja pabrikan. Gejala ini umumnya terjadi pada pertengahan abad ke-20 di mana tersedianya lapangan kerja sektor pemerintah masih cukup banyak. Sementara itu, kecil sekali persentase tenaga kerja berpendidikan rendah yang menganggur karena mereka lebih banyak yang berusaha secara mandiri dan melakukan usaha keluarga. Kedua status pekerjaan tersebut (wiraswasta dan berusaha dibantu buruh tetap/dibayar) jarang sekali dilakukan oleh mereka yang berpendidikan SMA ke atas. Hal tersebut sangatlah wajar jika dikatakan bahwa investasi pendidikan cenderung lebih menghasilkan tenaga-tenaga yang kurang mandiri. Tenaga-tenaga yang mandiri adalah justru mereka yang berpendidikan rendah atau tidak sekolah sama sekali. Kondisi tersebut sangatlah ironis, karena sebelum manusia Indonesia “tersentuh” oleh pendidikan formal, pada dasarnya mereka sudah memiliki kemandirian, akan tetapi setelah dididik dalam lingkungan pendidikan formal, mereka berubah menjadi orang-orang yang tidak mandiri dan bergantung pada lapangan kerja yang disediakan oleh orang lain.

*Keempat,* yaitu mayoritas ketersediaan tenaga kerja berpendidikan rendah. Sebagaimana diungkap oleh Litbang Kompas (Kompas, 4/10/2016) dengan merujuk data Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa jumlah tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan rendah, yaitu tidak sekolah, belum tamat, dan lulusan SD hingga Februari 2016 (Tabel 3) adalah terbesar dibandingkan pekerja yang berpendidikan SMP, SMA, ataupun Akademi/Diploma/Universitas, yakni mencapai 42,45 persen (52.432.307 pekerja) dari total 120.647.687 pekerja di seluruh Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas. Sementara itu, jumlah pekerja berpendidikan SMP sebesar 17,80 persen; jumlah pekerja berpendidikan SMA sebesar 27,39 persen; dan jumlah pekerja berpendidikan akademik/diploma/universitas hanya sebesar 11,34 persen. Angka-angka tersebut sebanding dengan Ikhtisar Data Pendidikan Dasar 2015/2016 yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yakni sebanyak 946.013 siswa (dari 4.381.997 siswa lulus SD) tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Adapun sebanyak 68.066 siswa (dari total 25.885.053 siswa SD) mengalami putus sekolah di bangku SD. Jumlah tersebut diperparah dengan akumulasi siswa yang hanya berijazah SD dari tahun-tahun ajaran sebelumnya, yaitu 1.422.932 orang pada 2012/2013, 1.426.926 siswa (2013/2014), dan 1.170.135 siswa (2014/2015). Jika ditambahkan semuanya, jumlahnya 5.032.072 orang, mendekati populasi di Singapura yang diperkirakan berjumlah 5.610.000 jiwa.

Tabel 3

Profil Pendidikan Tenaga Kerja Indonesia



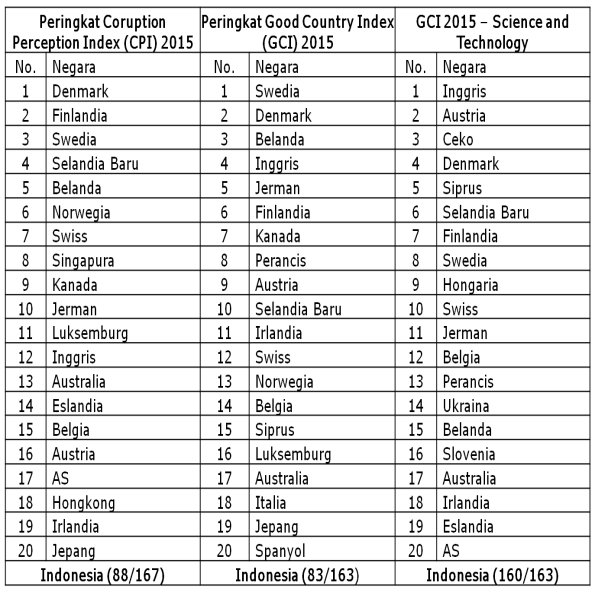
(Sumber: Kompas, 4/10/2016)

*Kelima*, yaitu tingginya indeks persepsi korupsi (CPI) dan rendahnya peringkat indeks negara baik (GCI). Berdasarkan hasil studi tahun 2015, Good Country Index (Indeks Negara Baik) Indonesia di peringkat ke-83, atau di bawah negara-negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia ada di bawah Filipina (74), Thailand (57), Malaysia (46), dan Singapura (24). Namun, jika dibedah lebih jauh dengan mencermati peringkat per indikator utama, Indonesia mendapat posisi paling buruk di indikator sumbangsih keilmuan dan teknologi. Indonesia ada di peringkat 160 dari 163 negara. Indonesia hanya unggul dari tiga negara, yakni Angla, Guinea, Ekuador, dan Irak. Sementara itu, untuk indikator budaya Indonesia berada di peringkat ke-131 dai 163 negara. Sedangkan pada indikator perdamaian dan keamanan internasional, Indonesia di peringkat ke-19 dari 163 negara; pada indikator keteraturan dunia, Indonesia di peringkat ke-62 dari 163 negara; pada indikator planet dan iklim, Indonesia di peringkat ke-138 dari 163 negara; pada indikator kemakmuran dan persamaan, Indonesia di peringkat ke-35 dari 163 negara; dan pada indikator kesehatan dan kesejahteraan, Indonesia di peringkat ke-70 dari 163 negara (Kompas,20/6/2016).

Sementara itu, jika melihat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK (Corruption Perception Index) tahun 2015, yang disusun oleh Transparency International, Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 167 negara. Ini artinya, tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi. Dalam analisis Antony Lee (Kompas, 20/6/2016) terungkap bahwa jika 20 negara teratas dalam Indeks Persepsi Korupsi 2015 disandingkan dengan peringkat Indeks Negara Baik (lihat Tabel 4), khusus di sektor keilmuan dan teknologi, ada 14 negara yang berisisan di kedua indeks tersebut. Ini artinya, tinggi rendahnya korupsi berkontribusi terhadap tinggi rendahnya Indeks Negara Baik yang dicapai negara tersebut, terutama pada sektor keilmuan dan teknologi. Dengan kata lain, jebloknya indeks negara baik terutama di sektor keilmuan dan teknologi di Indonesia disebabkan – salah satunya – karena faktor tingginya angka korupsi pada bidang pendidikan di Indonesia.

Tabel 4

20 Negara Peringkat Teratas CPI dan GCI serta Posisi Indonesia di Dalamnya



(Sumber: Kompas, 20/6/2016)

*Keenam*, yaitu kualitas daya saing sumber daya manusia Indonesia dari segala umur rendah. Seperti diungkapkan Victoria Fanggidae (Kompas, 2/9/2016) mengutip hasil tes PIAAC atau *Programme for the International Assessment of Adult Competencies* terbaru (2016) yang dilakukan oleh OECD (Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) bahwa peringkat Indonesia terpuruk di peringkat paling bawah hampir pada semua jenis kompetensi yang diperlukan orang dewasa untuk bekerja dan berkarya sebagai anggota masyarakat. Sebut saja semisal kemampuan literasi, numerasi, dan kemampuan pemecahan masalah. Skor Indonesia juga terendah di hampir semua kategori umur. Lebih dari separuh responden Indonesia dari level 1 (kategori pencapaian paling bawah) dalam hal kemampuan literasi. Dengan kata lain, Indonesia adalah negara dengan rasio orang dewasa berkemampuan membaca terburuk dari 34 negara OECD dan mitra OECD yang disurvei pada putaran ini. Capaian tersebut juga menandakan bahwa orang dewasa pada level <1 tersebut, menurut definisi OECD, hanya mampu membaca teks singkat tentang topik yang sudah akrab untuk menemukan satu bagian informasi spesifik. Untuk penyeleaian tugas tersebut, hanya pengetahuan kosakata dasar yang diperlukan dan pembaca tidak perlu memahami struktur kalimat atau paragraf. Kondisi yang mirip juga terjadi dalam tes PISA tahun 2012 yang menempatkan Indonesia juga pada peringkat bawah, yaitu peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi. Lebih lanjut diungkapkan Suryadi (2014, 10) bahwa rata-rata skor matematika, membaca, dan sains anak-anak Indonesia adalah 375, 396, dan 382, jauh di bawah rata-rata skor anak di negara OECD, yaitu 494, 496, dan 501.

*Ketujuh*, yaitu kompetensi pekerja Indonesia lemah, baik dari aspek *hardskill* maupun *softskill*, utamanya lulusan SMA/SMK dan sebagian lagi lulusan perguruan tinggi. Sebagaimana diungkapkan Satryo Soemantri Brodjonegoro (Kompas, 20/9/2016), bahwa dari survei langsung ke 460 perusahaan kecil menengah dengan sektor usaha yang beragam dan ukuran perusahaan yang juga beragam. Sebaran perusahaan yang disurvei termasuk di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan pola yang sedemikian rupa hingga merepresentasikan profil perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satu hasil survei yang menonjol adalah keluhan sebagian besar perusahaan terhadap lemahnya *soft-skill* para pekerja yang sebagian besar lulusan SMA/SMK dan sebagian lagi lulusan perguruan tinggi. Keluhan terhadap lemahnya *hard-skill* juga terungkap dalam survei tersebut, tetapi perusahaan mengakui bahwa lebih mudah bagi mereka membekali *hard-skill* para pekerja melalui berbagai pelatihan singkat dan magang. Adapun hasil survei perihal *soft-skill* yang menonjol adalah sebagai berikut: 92 persen menyatakan bahwa para pekerja sangat lemah dalam membaca meskipun dalam bahasa Indonesia; 90 persen dalam menulis; 83 persen dalam kemampuan berkomunikasi; dan 82 persen dalam kemampuan bekerja di dalam tim.

Dari ketujuh persoalan besar tersebut, inti permasalahannya sesungguhnya terletak pada dua hal, yaitu kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Namun, untuk menyelesaikan keduanya, menurut Azra (2012, 61) adalah tidak mudah, karena keduanya seperti lingkaran setan (*vicious circle*). Meskipun demikian, Azra berpendapat bahwa pendidikan adalah sarana yang paling efektif untuk mengatasi berbagai persoalan bangsa tersebut, meskipun membutuhkan waktu yang panjang. Dengan kata lain, jika merujuk pada pendapat Azra maka maju-mundurnya suatu negara ditentukan oleh kualitas pendidikan di negara tersebut. Ini artinya, jika melihat berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, sebagai tantangan pendidikan nasional, maka penyebab utamanya adalah rendahnya mutu pendidikan nasional.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah beserta seluruh elemen-elemennya harus memperbaiki dunia pendidikan nasional secara komprehensif dan sistematik. Perbaikan tersebut harus menciptakan suatu layanan pendidikan yang merata (*equity*), berkeadilan (*equality*), dan juga berkualitas (*quality*). Sejalan dengan pernyataan Suryadi, dkk (2014:62,65), peningkatan mutu pendidikan semestinya bukan lebih dikedepankan pada aspek *supremacy* -nya, tetapi justru diperkuat pada aspek *capacity* sehingga layanan pendidikan yang adil dan bermutu dapat diwujudkan. Di samping itu, untuk mengatasi berbagai persoalan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, pendidikan nasional harus dibangun sebagai sarana mobilitas sosial, dan bukan sebagai kekuatan untuk reproduksi sosial (Nuryatno, 2008:63-64). Dengan demikian, rakyat miskin dapat bermobilitas secara vertikal dan meninggalkan zona kemiskinannya menuju zona kemakmuran.

Sementara itu, pendidikan juga merupakan sebuah sistem. Di dalamnya terdapat berbagai elemen, sebagai subsistem pendukungnya, seperti *input* (siswa), proses (praktek, bimbingan latihan, dan kerja lapangan, sumber daya manusia, metode, dan material), *output* (lulusan), dan umpan balik (Hamalik, 2012:79). Merujuk pandangan Zamroni (2011:136-137) bahwa proses pembelajaran merupakan faktor yang langsung menentukan kualitas sekolah dan karena itulah peningkatan mutu pembelajaran merupakan inti dari reformasi pendidikan di negara manapun. Dipertegas oleh Karwati dan Triansa (2013: 51) yang menambahkan bahwa proses pembelajaran itu sendiri mencakup sejumlah unsur utama yang membentuk mutu pembelajaran, yaitu: tujuan pembelajaran, isi kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dana, manajemen dan evaluasi. Di sinilah kebijakan Pemerintah mengubah kurikulum nasional dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi Kurikulum 2013 menemukan relevansinya sebagai salah satu upaya perbaikan mutu pendidikan di Indonesia. Dasar pertimbangannya, merujuk penjelasan Mulyasa (2014: 163-164) bahwa Kurikulum 2013 secara konseptual memiliki tiga keunggulan di antaranya: *pertama*, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (konstektual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensinya masing-masing. *Kedua,* Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain. *Ketiga*, ada bidang-bidang studi atau mata pelajaran tertentu yang dalam pengembangannya lebih tepat menggunakan pendekatan kompetensi, terutama yang berkaitan dengan keterampilan. Di samping itu, Hidayat (2013:116) mengungkapkan pula bahwa Kurikulum 2013 dikembangkan untuk meningkatkan capaian pendidikan melalui dua strategi utama, yaitu: peningkatan efektivitas pembelajaran pada satuan pendidikan dan penambahan waktu pembelajaran di sekolah. Efektivitas pembelajaran tersebut dicapai melalui tiga tahapan, yaitu: efektivitas interaksi, efektivitas pemahaman, dan efektivitas penerapan.

Selanjutnya, perubahan kurikulum dari KTSP ke Kurikulum 2013 esensinya hanya terjadi pada 4 elemen, yaitu: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi, (3) standar proses, dan (4) standar penilaian . Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (UU Sisdiknas No. 20/2003 Pasal 35). Standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi peserta didik untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu (PP tentang SNP No. 13/2015, Pasal 1). Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (PP SNP No.13/2015 Pasal 1). Adapun standar penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar siswa (PP SNP No.13/2015 Pasal 1).

Untuk mengatasi rendahnya mutu proses pembelajaran, persoalan tersebut tidak bisa dipecahkan secara parsial, tetapi harus komprehensif dan sistematis, karena proses pembelajaran juga melibatkan banyak komponen di dalamnya. Salah satunya, yaitu bahan ajar. Menurut pendekatan sistem kurikulum, keberadaan bahan ajar sebagai bahan kajian yang dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai tujuan pendidikan melalui suatu proses atau kegiatan pembelajaran adalah suatu keniscayaan. Tanpa bahan ajar maka mustahil siswa mampu mencapai tujuan pendidikan. Sejalan dengan penjelasan Arifin (2011:81) yakni untuk mencapai tujuan pendidikan diperlukan isi atau materi yang harus disampaikan kepada peserta didik melalui suatu proses atau kegiatan yang sistematis dan tepat. Dipertegas oleh Sanjaya dan Andayani (2015:53) bahwa baik materi ataupun aktivitas, bahan ajar diarahkan dan difungsikan untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

Dari uraian tersebut terlihat bahwa bahan ajar memiliki posisi dan kedudukan yang urgen dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ini artinya bahan ajar memiliki peran penting bagi upaya perbaikan mutu proses pembelajaran melalui implementasi Kurikulum 2013. Di satu sisi lain, terdapat kesenjangan yang cukup berarti antara Kurikulum 2013 dengan KTSP, terutama yang terkait bahan ajar. Hal tersebut disebabkan karena pada Kurikulum 2013 buku teks memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diwajibkan, sedangkan pada kurikulum sebelumnya (KTSP) buku teks hanya memuat materi bahasan. Selain itu, guru pada Kurikulum 2013 diharapkan memenuhi kompetensi profesional, pedagogi, sosial, dan personal, berbeda dengan sebelumnya yakni guru hanya berfokus memenuhi kompetensi profesi (Majid, 2014:41).

Pertanyaannya adalah, *pertama*, hal-hal apa saja yang perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013?, dan *kedua*, bagaimana prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013? Artikel ini memberikan uraian penjelasan secara runtut sesuai dengan dua rumusan masalah tersebut. Dengan demikian dua hal utama yang menjadi tujuan utama penulisan artikel ini, yaitu: *pertama*, mengungkapkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013, dan *kedua*, mengungkapkan prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013.

**PEMBAHASAN**

Bagian pembahasan dalam artikel ini terbagi menjadi dua sub pokok bahasan, yaitu: *pertama*, hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013; dan *kedua*, prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013. Uraian selengkapnya mengenai masing-masing sub pokok bahasan tersebut dipaparkan sebagai berikut:

1. **Hal-hal yang Menjadi Dasar Pertimbangan dalam Pengembangan Bahan Ajar Mengacu Kurikulum 2013**

Bahan ajar adalah segala bahan (baik informasi, alat, maupun teks) yang disusun secara sistematis (*by design*) yang menampilkan sosok utuh darikompetensi yang akan dikuasai siswa dan digunakan dalam proses pembelajaran (Prastowo, 2014a:17). Selaras dengan makna isi atau materi dalam sistem kurikulum yakni semua kegiatan dan pengalaman yang dikembangkan dan disusun dalam rangka mencapai tujuan pendidikan (Arifin, 2011:88). Dalam konteks Kurikulum 2013, tujuan pendidikan tersebut dimanifestasikan dalam bentuk kompetensi. Sebagaimana disebutkan Mulyasa (2013:68-69), Kurikulum 2013 berbasis kompetensi. Oleh karenanya, Kurikulum 2013 memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi tertentu oleh siswa di mana di dalamnya mencakup sejumlah kompetensi, dan seperangkat tujuan pembelajaran yang dinyatakan sedemikian rupa, sehingga pencapaiannya dapat diamati dalam bentuk perilaku atau keterampilan siswa sebagai suatu kriteria keberhasilan. Dalam hal tersebut, Mulyasa juga menunjukkan bahwa setidak-tidaknya terdapat dua landasan teoritis yang mendasari Kurikulum 2013 berbasis kompetensi, yaitu: *pertama*, adanya pergeseran dari pembelajaran kelompok ke arah pembelajaran individual; dan *kedua*, pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) atau belajar sebagai penguasaan (*learning for mastery*) adalah suatu falsafah pembelajaran yang mengatakan bahwa sistem pembelajaran yang tpat, semua peserta didik dapat mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik.

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa keberadaan bahan ajar menjadi bagian tidak terpisahkan dari implementasi suatu kurikulum. Termasuk dalam hal ini, yaitu implementasi Kurikulum 2013. Dengan kata lain, pengembangan bahan ajar senantiasa mengacu kurikulum yang berlaku. Ini artinya, kaidah-kaidah atau pedoman-pedoman yang menjadi acuan dalam implementasi Kurikulum 2013 juga menjadi pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar di dalamnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pengembangan bahan ajar yaitu: *pertama*, menyediakan bahan ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, yakni bahan ajar yang sesuai dengan karakteristik dan *setting* atau lingkungan sosial siswa; *kedua*, membantu siswa dalam memperoleh alternatif bahan ajar di samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh; dan *ketiga*, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran (Prastowo, 2014b:141).

Dalam hal ini, implementasi Kurikulum 2013 merujuk pada regulasi perubahan terakhir per Juni 2016 terdiri dari 6 peraturan, yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No 13/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; (2) Permendikbud No. 20/2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan; (3) Permendikbud No. 21/2016 tentang Standar Isi; (4) Permendikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; dan (6) Permendikbud No.24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Sementara itu, dalam konteks pengembangan bahan ajar, perlu ditambahkan satu regulasi lagi sebagai acuannya, yaitu (1) Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (2) Permendikbud No. 8/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Dari kedelapan regulasi tersebut dapat diungkapkan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar, yaitu: *pertama*, bahan ajar disusun dan dikembangkan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia. Dijelaskan oleh Liem dan Prast (2016:155-180) bahwa terdapat 9 keterampilan wajib dalam menghadapi tantangan abad XXI, yaitu: krarivitas, komunikasi, *storry telling*, berpkir kritis, kemampuan bekerjasama, pemahaman lintas budaya, melek data, kemampuan untuk berubah, dan rasa ingin tahu (*curiosity*).

*Kedua*, karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman materi ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi, yang meliputi tiga jenis yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.  *Ketiga*, yaitu ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan.Dalam hal ini, ruang lingkup materi dirumuskan sesuai Permendikbud No. 21/2016 tentang Standar Isi dan Permendikbud No. 24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah. Kompetensi inti dan kompetensi dasar menjadi acuan dalam pengembangan bahan ajar. Hal itu karena kompetensi dasar pada kurikulum 2013 berisi kemampuan dan materi pembelajaran untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti (Permendikbud No.24/2016).

*Keempat*, buku yang digunakan di satuan pendidikan meliputi buku teks pelajaran dan buku non-teks pelajaran dan harus memenuhi standar kelayakan oleh Kementerian atau BSNP. Buku teks pelajaran memuat materi dan proses pembelajaran, sistem penilaian serta kompetensi yang diharapkan (Hidayat, 2013:126). Buku teks pelajaran dan buku non teks pelajaran yang layak harus memenuhuhi kriteria (Permendikbud No. 8/2016): (1) memenuhi nilai/norma positif yang berlaku di masyarakat, antara lain tidak mengandung unsur pornografi, paham ekstrimisme, radikalisme, kekerasan, SARA, bias *gender*, dan tidak mengandung nilai penyimpangan lainnya; (2) memenuhi kriteria penilaian sebagai buku yang layak digunakan oleh Satuan Pendidikan di antaranya: (a) wajib memenuhi unsur: kulit buku, bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir; (b) kulit buku pada Buku Teks Pelajaran dan Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi kulit depan buku, kulit belakang buku, dan punggung buku; (c) bagian awal buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi halaman judul, halaman penerbitan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman tabel, dan penomoran halaman; (d) bagian awal buku pada Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi halaman judul dan halaman penerbitan serta dapat juga menambahkan halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar gambar, halaman tabel, dan penomoran halaman; (e) bagian isi buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi aspek materi, aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan; (f) bagian isi buku pada Buku Non Teks Pelajaran wajib memenuhi aspek materi, serta dapat juga menambahkan aspek kebahasaan, aspek penyajian materi, dan aspek kegrafikaan; (g) bagian akhir buku pada Buku Teks Pelajaran wajib memenuhi informasi tentang pelaku perbukuan, glosarium, daftar pustaka, indeks, dan lampiran; (h) bagian akhir buku pada Buku Non Teks Pelajaran yang non fiksi wajib memenuhi informasi tentang pelaku perbukuan dan indeks, serta dapat juga menambahkan glosarium, daftar pustaka, dan lampiran; dan (i) Buku Teks Pelajaran yang dinyatakan layak harus memuat aktivitas untuk peserta didik, dan muatan aktivitas untuk peserta didik digunakan dalam proses pembelajaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Buku Teks Pelajaran.

*Kelima*, bahan ajar digunakan untuk proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 digunakan untuk pencapaian sasaran pembelajaran yang mencakup pengembangan ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dielaborasi untuk setiap satuan pendidikan. Ketiga ranah kompetensi tersebut memiliki lintasan perolehan (proses psikologis) yang berbeda. Sikap diperoleh melalui aktivitas “menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan”. Pengetahuan diperoleh melalui aktivitas “mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, mencipta”. Keterampilan diperoleh melalui aktivitas “mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta”. Karaktersitik kompetensi beserta perbedaan lintasan perolehan turut serta mempengaruhi karakteristik standar proses. Untuk memperkuat pendekatan ilmiah (*scientific*), tematik terpadu (tematik antar matapelajaran), dan tematik (dalam suatu mata pelajaran) perlu diterapkan pembelajaran berbasis penyingkapan / penelitian *(discovery/inquiry learning)*. Untuk mendorong kemampuan peserta didik untuk menghasilkan karya kontekstual, baik individual maupun kelompok maka sangat disarankan menggunakan pendekatan pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah (*project based learning)* (Permendikbud No.22/2016).

Di samping itu, karakteristik proses pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik kompetensi. Pembelajaran tematik terpadu digunakan untuk SD/MI/SDLB/Paket A. Pembelajaran tematik terpadu juga digunakan pula di SMP/MTs/SMPLB/Paket B tetapi sudah mulai memperkenalkan mata pelajaran dengan mempertahankan tematik terpadu pada IPA dan IPS. Sedangkan karakteristik proses pembelajaran di SMA/ MA/ SMALB/ SMK/ MAK/ Paket C/ Paket C Kejuruan secara keseluruhan berbasis mata pelajaran, meskipun pendekatan tematik masih dipertahankan. Adapun Standar Proses pada SDLB, SMPLB, dan SMALB diperuntukkan bagi tuna netra, tuna rungu, tuna daksa, dan tuna laras yang intelegensinya normal (Permendikbud No.22/2016).

Sementara itu, kompetensi sikap spiritual maupun sikap sosial dicapai melalui pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu keteladanan, pembiasaan, dan budaya sekolah dengan memperhatikan karakteristik mata pelajaran serta kebutuhan dan kondisi peserta didik, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti serta Pendidikan Kewarganegaraan. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan guru dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Sedangkan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dicapai melalui pembelajaran langsung (*direct teaching*) (Permendikbud No.24/2016).

*Keenam*, bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik yang mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) pada aspek pengetahuan dan dampak pengiring (*nurturant effect*) pada aspek sikap. Penilaian dilakukan dari sejak proses hingga hasil pembelajaran. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dengan menggunakan alat: lembar pengamatan, angket sebaya, rekaman, catatan anekdot, dan refleksi. Evaluasi hasil pembelajaran dilakukan saat proses pembelajaran dan di akhir satuan pelajaran dengan menggunakan metode dan alat: tes lisan/perbuatan, dan tes tulis (Permendikbud No.23/2016).

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat 6 hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013, yaitu: (1) bahan ajar disusun dan dikembangkan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia; (2) karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman bahan ajar ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi, yang meliputi tiga jenis yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (3) ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan; (4) buku yang digunakan di satuan pendidikan meliputi buku teks pelajaran dan buku non-teks pelajaran dan harus memenuhi standar kelayakan oleh Kementerian atau BSNP; (5) bahan ajar digunakan untuk proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa; dan (6) bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.

1. **Prosedur Pengembangan Bahan Ajar Mengacu Kurikulum 2013**

Pengembangan bahan ajar harus disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku. Dalam konteks pembahasan ini, kurikulum yang tengah digunakan adalah Kurikulum 2013. Oleh karena itu, pengembangan bahan ajar harus mengacu Kurikulum 2013. Dengan demikian, bahan ajar yang dikembangkan dapat sesuai dan selaras dengan kebutuhan siswa untuk pencapaian kompetensi yang telah ditentukan.

Prastowo (2014b:153) dengan merujuk buku Panduan Pengembangan Bahan Ajar yang diterbitkan Depdiknas mengungkapkan bahwa prosedur umum pengembangan bahan ajar terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu: (1) analisis kebutuhan kebutuhan bahan ajar; (2) memilih sumber belajar, (3) menyusun peta bahan ajar; dan, (4) membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing bentuk bahan ajar.Sementara itu, tahap berikutnya untuk menilai dan mengukur kesesuaian antara bahan ajar dengan kompetensi yang menjadi target pembelajaran dilakukan yaitu validasi bahan ajar. Tahap validasi tersebut untuk memastikan kualitas bahan ajar sesuai dengan tujuan awal pengembangannya (Daryanto, 2013:22-23). Uraian selengkapnya untuk masing-masing tahapan tersebut, seperti terlihat pada Gambar 1, dipaparkan berikut ini.

Gambar 1

Prosedur Pengembangan Bahan Ajar

*Pertama*, analisis kebutuhan kebutuhan bahan ajar. Analisis kebutuhan bahan ajar adalah proses awal yang harus ditempuh dalam menyusun bahan ajar. Analisis ini bertujuan agar bahan ajar yang dibuat sesuai dengan tuntutan kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa. Analisis kebutuhan bahan ajar meliputi tiga tahapan, yaitu analisis terhadap kurikulum, analisis sumber belajar, dan penentuan jenis serta judul bahan ajar (Prastowo, 2014b: 153). Keseluruhan proses tersebut menjadi bagian integral dari suatu proses pembuatan bahan ajar yang tidak bisa kita pisah-pisahkan.

Analisis kurikulum dilakukan dengan cara mengidentifikasi sejumlah komponen kurikulum sebagai berikut: (a) SKL, KI, KD, Indikator, Tema, dan Subtema; (b) materi pokok; dan (c) pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa sehingga mereka dapat menguasai kompetensi yang telah ditentukan. Identifikasi SKL, KI, KD, dan Indikator dilakukan untuk mengidentifikasi standar kompetensi yang harus dikuasai oleh siswa, dan kemudian berlanjut kepada kebutuhan materi yang dibutuhkan untuk menguasai kompetensi tersebut. Untuk mengidentifikasi materi pokok yang dapat menunjang pencapaian kompetensi, ada 6 (enam) pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu: karakteristik tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spiritual siswa; kebermanfaatan bagi siswa; struktur keilmuan; kedalaman dan keluasaan materi; relevansi dengan kebutuhan siswa dan tuntutan lingkungan; dan terakhir, alokasi waktu yang tersedia (Prastowo, 2014b:165). Selanjutnya, pengalaman belajar adalah kegiatan mental dan fisik yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan sumber belajar melalui pendekatan pembelajaran yang bervareasi dan mengaktifkan siswa. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai siswa. Rumusan pengalaman belajar juga mencerminkan pengelolaan pengalaman siswa. Pengalaman belajar adalah suatu aktivitas yang didesain oleh guru supaya dilakukan oleh siswa agar mereka menguasai kompetensi yang telah ditentukan melalui kegiatan pembelajaran tematik yang diselenggarakan. Jadi pengalaman belajar harus lah disusun secara jelas dan operasional. Sehingga langsung bisa dipraktikkan dalam kegiatan pembelajaran (Tim Penyusun Depdiknas, 2008:16).

Langkah analisis kebutuhan bahan ajar berikutnya adalah analisis sumber belajar. Analisis sumber belajar dilakukan terhadap beberapa aspek. Ada tiga aspek yang menjadi perhatian dalam analisis ini, yaitu aspek ketersediaan, kesesuaian, dan kemudahan dalam memanfaatkannya (Tim Penyusun Depdiknas, 2008:17). Kriteria pertama, yaitu ketersediaan, berkenaan dengan ada - tidaknya sumber belajar di lingkungan sekitar. Jadi kriteria kedua ini lebih mengacu pada faktor pengadaan sumber belajar. Dalam hal ini, penting untuk diperhatikan bahwa dalam mengupayakan sumber belajar diharapkan agar yang praktis dan ekonomis, serta sudah ada di lingkungan sekitar. Dengan begitu, pengembang tidak akan kesulitan untuk menyediakannya. Apabila sumber belajar tidak ada dan atau ada tetapi barangnya sulit untuk dijangkau, maka disarankan untuk jangan dipilih. Kriteria kesesuaian di sini maksudnya adalah, bagaimanakah tingkat kesesuaian sumber belajar tersebut dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Jadi hal utama yang harus diperhatikan dalam kriteria ini adalah dibutuhkan pemahaman yang benar kesesuaian sumber belajar yang dipilih dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Apabila sumber belajar mampu mendukung siswa dalam menguasai kompetensi belajar, maka sumber belajar itu layak dipilih dan digunakan. Namun, jika tidak, sebaiknya jangan dipilih apalagi digunakan. Terakhir yaitu kemudahan. Maksudnya adalah mudah-tidaknya sumber belajar digunakan. Jika sumber belajar itu membutuhkan persiapan dan *skill* yang khusus, perlu persiapan yang lama, serta membutuhkan perangkat pendukung lain yang rumit sekaligus sulit operasionalnya, maka sebaiknya sumber belajar tersebut tidak dipilih. Alangkah baiknya jika dipilih sumber belajar yang mudah pengoperasiannya. Dengan demikian, sumber belajar tersebut dapat secara efektif membantu siswa menguasai kompetensi pembelajaran yang diharapkan.

Langkah analisis kebutuhan bahan ajar terakhir yaitu memilih dan menentukan baha ajar. Tujuannya adalah untuk memenuhi kriteria bahan ajar harus menarik sekaligus dapat membantu siswa untuk mencapai kompetensi. Karena pertimbangan tersebut, maka langkah-langkah yang hendaknya dilakukan antara lain menentukan dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan atau kecocokan dengan kompetensi dasar yang harus dikuasi siswa; menetapkan jenis dan bentuk bahan ajar berdasarkan analisis kurikulum dan analisis sumber bahan (Prastowo, 2014a:58).

Ada sejumlah pedoman yang hendaknya kita ikuti dalam melakukan pemilihan bahan ajar. Setidak-tidaknya ada 3 (tiga) prinsip yang bisa dijadikan pedoman yaitu :(a) prinsip relevansi, yakni bahan ajar yang dipilih hendaknya ada relasi dengan pencapaian standar kompetensi maupun kompetensi dasar; (b) prinsip konsistensi, maksudnya bahan ajar yang dipilih hendaknya memiliki nilai keajegan sehingga antara kompetensi dasar yang mesti dikuasai peserta didik dengan bahan ajar yang disediakan memiliki keselarasan dan kesamaan; dan (c) prinsip kecukupan, yakni ketika memilih bahan ajar hendaknya dicari yang memadai untuk membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan (Tim Penyusun Depdiknas, 2004:6).

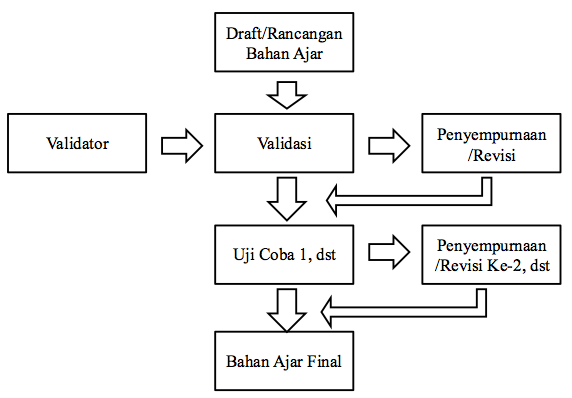
Ditambahkan oleh Arif dan Napitupulu (1997:36-37), yakni ada pula 4 (empat) hal penting lain yang juga perlu diperhatikan dalam pemilihan bentuk bahan ajar, yaitu: (a) kebutuhan dan tingkat kemampuan awal para peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran; (b) tempat dan keadaan di mana bahan ajar akan digunakan; (c) metode penerapannya dan penjelasannya; dan (d) biaya proses dan produksi serta alat-alat yang digunakan untuk memproduksi bahan ajar.

*Kedua*, memilih sumber belajar. Pada langkah kedua pengembangan bahan ajar ini, menurut Sudjana dan Rivai (1989:84-86),terdapat dua kriteria yang bisa digunakan dalam pemilihan sumber belajar, yaitu kriteria umum dan kriteria khusus. Secara umum, ketika memilih sumber belajar hendaknya perlu diperhatikan 4 (empat) kriteria sebagai berikut: (a) segi ekonomisnya, yakni sumber belajar hendaknya harganya murah atau tidak mahal sehingga semua lapisan masyarakat akan mampu mengadakannya; (b) segi praktis dan sederhananya, yakni sumber belajar yang digunakan sebaiknya tidak memerlukan pelayanan atau pengadaan sampingan yang sulit dan langka; (c) segi mudah diperolehnya, yakni sumber belajar hendaknya dipilih yang dekat dan mudah dicari; dan (d) bersifat fleksibel, yakni sumber belajar bisa dimanfaatkan untuk berbagai tujuan pembelajaran, atau kompatibel. Adapun kriteria khususnya terdiri dari: (a) sumber belajar dapat memotivasi peserta didik dalam belajar; (b) sumber belajar untuk tujuan pengajaran, yakni sumber belajar yang dipilih sebaiknya mendukung kegiatan belajar mengajar yang kita selenggarakan; (c) sumber belajar untuk penelitian, yakni sumber belajar yang digunakan hendaknya dapat diobservasi, dianalisis, dicatat secara teliti, dan sebagainya; (d) sumber belajar untuk memecahkan masalah, yakni sumber belajar hendaknya mengatasi problem belajar peserta didik yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar; dan (e) sumber belajar dapat untuk presentasi, yakni sumber belajar yang dipilih di sini hendaknya bisa sebagai alat, metode, atau strategi penyampaian pesan.

*Ketiga*, menyusun peta bahan ajar. Langkah ini memiliki 3 macam kegunaan yaitu:(a) untuk mengetahui jumlah bahan ajar yang harus ditulis; (b) untuk mengetahui sekuensi atau urutan bahan ajarnya seperti apa (sekuensi bahan ajar ini sangat diperlukan dalam menentukan prioritas penulisan); dan (c) untuk menentukan sifat bahan ajar, apakah *dependent*  atau *independent* (Tim Penyusun Depdiknas, 2008:17).

*Keempat*, membuat bahan ajar sesuai struktur. Dalam hal ini, struktur bahan ajar pada umumnya meliputi 7 (tujuh) komponen, yaitu: (a) judul, (b) petunjuk belajar, (c) kompetensi dasar atau materi pokok, (d) informasi pendukung, (e) latihan, (f) tugas atau langkah kerja, dan (g) penilaian (Tim Penyusun Depdiknas, 2008:17). Tiap-tiap jenis bahan ajar seperti bahan ajar cetak, bahan ajar model/maket, bahan ajar audio, bahan ajar audio-visual, bahan ajar interaktif, dan bahan ajar lingkungan memiliki karakteristik komponen yang berbeda-beda (Prastowo, 2014b:179-185). Dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013, bahan ajar perlu dikembangkan sesuai struktur bahan ajar masing-masing.

*Kelima*, melakukan validasi bahan ajar. Prosedur validasi dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2

Prosedur Validasi

(Sumber : Daryanto, 2013:22-23)

Menurut Daryanto (2013:22-23), validasi adalah proses untuk menguji kesesuaian bahan ajar dengan kompetensi yang menjadi target belajar. Bila isi atau kualitas bahan ajar sesuai, artinya efektif untuk digunakan dalam mempelajari kompetensi yang menjadi target belajar, maka bahan ajar dinyatakan valid (sahih). Validasi ini dapat dilakukan dengan car meminta bantuan ahli yang menguasai kompetensi yang dipelajari. Jika tidak memungkinan, validasi tersebut dapat pula dilakukan oleh sejumlah guru yang mengajar pada bidang atau kompetensi tersebut. Jika hasil validasi ternyata menyatakan bahwa bahan ajar tidak valid maka bahan ajar tersebut dapat diperbaiki sehingga menjadi valid dan layak digunakan.

Sementara itu, prosedur teknis untuk pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 khususnya untuk bahan ajar cetak perlu diperhatikan beberapa aspek sebagai berikut: (a) mengenai pedoman penggunaan bahasa, (b) tingkat keterbacaan bahan ajar cetak, dan (c) perancangan bahan ajar cetak, menjadi persoalan yang krusial dan menentukan efektivitas suatu bahan ajar cetak.

Sebagaimana dikemukakan Sitepu (2012:107-108), dalam konteks ke-Indonesia-an, bahasa yang digunakan dalam pengembangan bahan ajar adalah bahasa Indonesia, kecuali untuk mata pelajaran bahasa asing yang mungkin dalam bahasa asing yang bersangkutan. Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat memudahkan atau menyulitkan peseta didik mempelajarai bahan ajar yang disampaikan. Penggunaan bahasa yang kurang atau tidak tepat dapat juga menimbulkan kesalahpahaman atau distorsi pada peserta didik. Sementara itu, agar terjadi komunikasi yang efektif melalui bahan ajar cetak, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan dalam menggunakan bahasa dalam ragam tulisan, yakni kemampuan berbahasa siswa, kaidah bahasa, pilihan kata, gaya bahasa, dan keterbacaan.

Adapun tingkat keterbacaan dipengaruhi oleh kemampuan membaca peserta didik, ketepatan kaidah-kaidah bahasa, struktur bahasa, pilihan kata, dan gaya bahasa yang dipergunakan. Apabila rambu-rambu dalam menggunakan bahasa yang telah diuraikan sebelumnya diikuti dengan baik, besar kemungkinan tingkat keterbacaan bahan aja yang ditulis cukup tinggi. Sungguh pun demikian, seharusnya penulis atau pengembang bahan ajar cetak mengukur terlebih dahulu tingkat keterbacaan isi bahan jar cetak sebelum dicetak, diterbitkan, dan didistribusikan (Sitepu, 2012:119-120). Abidin (2015:215-216) mengungkapkan bahwa keterbacaan adalah alih bahasa dari “*readability*”. Istilah “*readability*” pada dasarnya merupakan konsep mengenai pengukuran tingkat kesulitan sebuah buku atau wacana (atau bahan ajar cetak) secara obyektif. Tingkat keterbacaan tersebut biasanya dinyatakan dengan peringkat kelas. Dengan demikian, setelah mengukur tingkat kesulitan sebuah wacana, orang dapat mengetahui kecocokan materi bacaan untuk peringkat kelas tertentu; peringkat enam, peringkat empat, peringkat dua, dan sebagainya. Dengan kata lain, keterbacaan (*readability*) adalah ukuran tentang sesuai tidaknya suatu bacaan bagi pembaca tertetu dilihat dari segi tingkat kesukaran atau kemudahan wacananya. Adapaun keterbacaan dalam konteks pengembangan bahan ajar, menurut Sitepu, adalah sejauh mana peserta didik dapat memahami bahan pelajaran yang disampaikan dengan bahasa ragam tulis. Untuk mengukur tingkat keterbacaan bahan ajar cetak ada sejumlah instrumen atau formula (rumus) yang dapat digunakan, setidak-tidaknya ada 7 alat ukur yaitu: (a) *New Dale* (1948), (b) *Flesch Grade Level* (1948), (c) *SPACHE* (1953), (d) *Fog Index* (1953), (e) *Poers-Summer-Kearl* (1958), (f) *SMOG* (1969), dan (g) *FORCAST* (1973) (Sitepu, 2012:120).

Di samping tingkat keterbacaan bahan ajar cetak, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu tingkat kompleksitas teks. Menurut Abidin (2015:222-225) mengutip pendapat Sisson and Sisson, tingkat kompleksitas teks dapat diukur dengan menggunakan indikator kuantitatif, kualitatif, serta pembaca dan tugas. Indikator kuantitatif yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kompleksitas teks meliputi: (a) panjang kata, (b) frekuensi pengunaan kata, (c) panjang kalimat, (d) frekuensi penggunaan kalimat, dan (e) kohesi teks. Indikator-indikator kualitatif yang dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas teks meliputi: (a) genre teks, (b) gaya penulisan, (c) kompleksitas kalimat, (d) bahasa nonliteral, dan (e) keeksplisitan tema dan ide. Indikator-indikator pembaca yang dapat digunakan untuk menentukan kompleksitas teks meliputi (a) skemata, (b) minat, dan (c) motivasi.

Di samping harus mempertimbangkan tingkat keterbacaan teks dan kompleksitas teks, pengembangan bahan ajar cetak harus diketahui pula tingkat kesulitan teks-nya. Pengukuran kesulitan teks dapat dilakukan dengan mengkaji teks berdasarkan kriteria kesulitan sebuah teks yang telah dikemukakan oleh para ahli. Dalam pandang berbagai ahli, menurut Abidin (2015:225) kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesulitan teks ada tiga kriteria yakni bahasa, format teks, dan konten dan konteks teks.

Sementara itu, upaya menyelaraskan teks dengan karakteristik anak tidak cukup dilakukan dengan hanya mengetahui kesulitan teks. Hal pertama yang justru sebenarnya harus diketahui adalah karakteristik umum anak pada setiap jenjang kelas. Penjenjangan kemampuan anak pada setiap kelasnya tentu bersifat empiris, artinya akan sangat bergantung pada pengetahuan siap, latar belakang lingkungan sosial budaya, peran orang tua, peran guru, dan daya dukung lingkungan sekolah. Namun demikian, kemahiran literasi anak secara umum dapat dijenjangkan berdasarkan variabilitas kriteria tertentu. Berikut ini lima jenjang pembaca, yakni prapermulaan, permulaan, peralihan, perkembangan, dan perluasan atau mandiri (Abidin, 2015:227).

Terakhir, dalam teknis pengembangan bahan ajar cetak yang perlu diperhatikan yaitu perancangan bahan ajar cetak. Ada 7 prinsip dasar yang harus diketahui dan dipahami, yaitu: (a) ukuran buku, (b) tata letak, (c) ukuran huruf dan spasi, (d) jenis huruf, (e) spasi, susunan, dan teknik menulis teks (f) ilustrasi, dan (g) anatomi buku.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 terdiri dari prosedur umum dan prosedur teknis. Prosedur umum tersebut meliputi (1) analisis kebutuhan kebutuhan bahan ajar; (2) memilih sumber belajar, (3) menyusun peta bahan ajar; (4) membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing jenis bahan ajar; (5) validasi bahan ajar. Sedangkan prosedur teknis pengembangan bahan ajar, utamanya bahan ajar cetak setidak-tidaknya meliputi 6 hal yaitu: (1) mengikuti pedoman penggunaan bahasa, (2) mengukur tingkat keterbacaan bahan ajar cetak, (3) mengukur tingkat kompleksitas teks, (4) mengukur tingkat kesulitan teks, (5) menyelaraskan dengan tahap perkembangan literasi siswa, dan (6) memperhatikan panduan perancangan bahan ajar cetak yang layak sesuai BSNP.

**PENUTUP**

1. **Simpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan yaitu: *pertama*, terdapat 6 hal yang perlu dipertimbangkan dalam pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013, yaitu: (1) bahan ajar disusun dan dikembangkan dalam rangka pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang berbasis pada Kompetensi Abad XXI, Bonus Demografi Indonesia, dan Potensi Indonesia menjadi Kelompok 7 Negara Ekonomi Terbesar Dunia, dan sekaligus memperkuat kontribusi Indonesia terhadap pembangunan peradaban dunia; (2) karakteristik, kesesuaian, kecukupan, keluasan, dan kedalaman bahan ajar ditentukan sesuai dengan karakteristik kompetensi beserta proses pemerolehan kompetensi, yang meliputi tiga jenis yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (3) ruang lingkup materi dirumuskan berdasarkan kriteria muatan wajib yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan karakteristik satuan pendidikan dan program pendidikan; (4) buku yang digunakan di satuan pendidikan meliputi buku teks pelajaran dan buku non-teks pelajaran dan harus memenuhi standar kelayakan oleh Kementerian atau BSNP; (5) bahan ajar digunakan untuk proses pembelajaran yang diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis siswa; dan (6) bahan ajar digunakan dalam proses pembelajaran yang menggunakan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh.\

*Kedua*, prosedur pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013 terdiri dari prosedur umum dan prosedur teknis. Prosedur umum tersebut meliputi (1) analisis kebutuhan kebutuhan bahan ajar; (2) memilih sumber belajar, (3) menyusun peta bahan ajar; (4) membuat bahan ajar berdasarkan struktur masing-masing jenis bahan ajar; (5) validasi bahan ajar. Sedangkan prosedur teknis pengembangan bahan ajar, utamanya bahan ajar cetak setidak-tidaknya meliputi 6 hal yaitu: (1) mengikuti pedoman penggunaan bahasa, (2) mengukur tingkat keterbacaan bahan ajar cetak, (3) mengukur tingkat kompleksitas teks, (4) mengukur tingkat kesulitan teks, (5) menyelaraskan dengan tahap perkembangan literasi siswa, dan (6) memperhatikan panduan perancangan bahan ajar cetak yang layak sesuai BSNP.

1. **Saran**

Dari uraian pembahasan di atas dapat direkomendasikan yaitu: *pertama*, perbaikan mutu pendidikan dapat dilakukan salah satunya yaitu dengan pengembangan bahan ajar mengacu Kurikulum 2013. Untuk itu, para pengembang bahan ajar hendaknya selalu berpedoman dengan regulasi yang mendasari pelaksanaan kurikulum tersebut yaitu: (1) Peraturan Pemerintah No 13/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan; (2) Permendikbud No. 20/2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan; (3) Permendikbud No. 21/2016 tentang Standar Isi; (4) Permendikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah; (5) Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan; (6) Permendikbud No.24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah; (7) Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah, dan (8) Permendikbud No. 8/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

*Kedua*, pengembangan bahan ajar dilakukan dengan prosedur umum dan prosedur khusus secara konsisten dan obyektif. Dengan demikian, produk bahan ajar yang dihasilkan memenuhi standar kelayakan dan memadai untuk perbaikan mutu proses pembelajaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abidin, Yunus, 2015, *Pembelajaran Multiliterasi: Sebuah Jawaban atas Tantangan Pendidikan Abad ke-21 dalam Konteks Keindonesiaan*, Bandung: Refika Aditama.

Arif, Zainudin, dan Napitupulu, W.P. , 1997, *Pedoman Baru Menyusun Bahan Ajar,* Jakarta: Grasindo.

Arifin, Zainal, 2011, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosdakarya.

Brodjonegoro, Satryo Soemantri, “Ketidakberdayaan Negara”, *Kompas*, Selasa, 20 September 2016.

Daryanto, 2013, *Menyusun Modul: Bahan Ajar untuk Persiapan Guru dalam Mengajar*, Yogyakarta: Galva Media, 2013.

Fanggidae, Victor,”Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia”, *Kompas*, Jumat, 2 September 2016.

Hamalik, Oemar, 2012, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, Cet.V, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Hidayat, Sholeh, 2013, *Pengebangan Kurikulum Baru*, Cet.II, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Karwati, Euis, dan Priansa, Donni Juni, 2013, *Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah: Membangun Sekolah yang Bermutu*, Bandung: Alfabeta.

*Kompas*, Selasa, 4 Oktober 2016.

Lee, Antony, “Indeks Negara Baik: Korupsi dan Jebloknya Kontribusi Keilmuan RI”, *Kompas*, Senin, 20 Juni 2016.

Liem, Ina, dan Prast, Budi, 2016, *Majors for the Future*, Jakarta: Grasindo.

Mafuchan, AH, “Reorientasi Tenaga Kerja”, *Kompas*, Sabtu, 5 Maret 2016.

Mulyasa, E. , 2013, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

Nugroho, Riant, 2010, *Memahami Latar Belakang Pemikiran Enterpreneurship Ciputra*, Cet.II,Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nuryatno, M. Agus, 2008, *Madzhab Pendidikan Kritis: Menyingkap Relasi Pengetahuan Politik dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Resist Book.

Peraturan Pemerintah No 13/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 19/2015 tentang Standar Nasional Pendidikan

Permendikbud No. 20/2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan

Permendikbud No. 21/2016 tentang Standar Isi

Permendikbud No. 22/2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud No. 23/2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

Permendikbud No. 71/2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah

Permendikbud No. 8/2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan.

Permendikbud No.24/2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Menengah

Prastowo, Andi, 2014a, *Panduan Kreatif Membuat Bahan Ajar Inovatif*, Cet, VII, Yogyakarta: Diva Press.

Prastowo, Andi, 2014b, *Pengembangan Bahan Ajar Tematik*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sawitri, Angelina Anjar, “BPS: Pengangguran Terbuka di Indonesia Capai 7,02 Juta Orang”, *Tempo*, Rabu, 4 Mei 2016, https://m.tempo.co/read/news/2016/05/04/173768481/bps-pengangguran-terbuka-di-indonesia-capai-7-o2-juta-orang, Diunduh pada Tanggal 17 Oktober 2016

Sitepu, B.P., 2012, *Penulisan Buku Teks Pelajaran*, Bandung: Remaja Rosdakarya Bekerjasama dengan Universitas Negeri Jakarta.

Sudjana, Nana, dan Rivai, Ahmad, 1989, *Teknologi Pengajaran*, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Suryadi, Ace, 2014, *Pendidikan Indonesia Menuju 2025: Outlook: Permasalahan, Tantangan dan Alternatif Kebijakan*, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Suryadi, Ace, dkk, 2014, *Pendidikan untuk Transformasi Bangsa*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Tim Pengembang MKDP Kurikulum dan Pembelajaran Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan FIP UPI, 2015, *Kurikulum dan Pembelajaran*, Cet.V, Jakarta: Rajawali Pers.

Tim Penyusun Depdiknas, 2004, *Pedoman Pemilihan dan Pemanfaatan Bahan Ajar*, Jakarta: Depdiknas.

Tim Penyusun Depdiknas, 2008, *Panduan Pengembangan Bahan AJar*, Jakarta: Depdiknas, 2008.

Zamroni, 2011, *Dinamika Peningkatan Mutu,* Yogyakarta: Gavin Kalam Utama.

1. Disajikan dalam Seminar Nasional bertema “Strategi Pengembangan Bahan Ajar untuk Implementasi Kurikulum 2013” di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Surabaya Tanggal 5 November 2016 [↑](#footnote-ref-1)